

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Congge, Umar. 2015. *Potret Birokrat Lokal*. Makassar: CV Sah Media
- Fenwick, Stewart, Nasution Iur Adnan Buyung dan Saleh, Abdul Rahman. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nuswardani, Nunuk. 2019. *Buku Ajar Pengantar Hukum Administrasi*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka
- Patarai H M Idris. 2015. *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makassar: Penerbit De La Macca
- Rachmitasari, Diani Indah, Martubong, Yustus dan Nurtjahjo, Hendro. 2013. *Memahami Maladministrasi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Karya Bakti
- Remaja, I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
- Ridwan, HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saggaf, H M Said dan Akib, Haedar. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Makasar: CV Sah Media
- Samil, Nurmah. 2018. *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah Kajian Kritis Pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Setiawan, Andi, Ulfah, Irma Fitriana dan Haboddin Muhtar. 2015. *Pengantar State Auxiliary Agency*. Malang: UB Press
- Suteki dan Taufani, Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press
- Taufikukohman. 2015. *Optimalisasi Peningkatan Investigasi Ombudsman RI Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Vrus Disease 2019* (Covid-19)
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kota Semarang

Jurnal

- Absori, Dimyati, Khuzdaifah dan Elviandri. 2019. *uo Vadis Negara Kesejahteraan Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Vol. 31 No. 2, Universitas Gajah Mada
- Azhar, Muhamad dan Azahra, Hanna Aulia. 2020. *Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Semarang: Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3 Ed. 2, Universitas Diponegoro
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Semarang: Jurnal Gema Keadilan Vol.1 Edisi.1, Universitas Diponegoro
- Desiana, Ayu. 2013. *Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jambi: Jurnal Inovatif Vol. 6 No. 2, Universitas Jambi
- Devi, Iga Sukma, Adiyanta, F.C. Susila dan Sa'adah Nabitatus. 2019. *Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Oleh Penyelenggara Negara Sebagai Bentuk Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance*. Semarang: *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 3, Universitas Diponegoro
- Fajar, Ni Made Anggia Pramesthi. 2019. *Maladministrasi dalam Pelaksanaan Administrasi Negara*. Bali: Jurnal Yustitia Vol. 13 No. 2, Universitas Ngurah Rai

- Fadilah, Nurul Laili. 2015. *Urgensitas Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik*. Jember: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Th.28 No.2, Universitas Jember
- Gumbiro, Seno Wibowo dan Riwanto, Agus. 2017. *Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945)*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.6 No.3
- Handayani, Diah, dkk. 2020. *Penyakit Virus Corona 2019*. Jakarta: Jurnal Respirologi Indonesia Vol.40 No.2
- Ibad, Syahrul. 2018. *Eksistensi Lembaga Ombudsman Daerah dalam Mengawal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Malang: Jurnal Dialektika, Vol. 3 No. 1, Universitas Islam Raden Rahmad
- Izzati, Nabila Firstia. 2020. *Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal SASI, Vol. 26 No. 2, Universitas Indonesia
- Juliani, Henny.2010. *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Good Governance*. Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 No.4, Universitas Diponegoro
- Kadarsih, Setiajeng. 2010. *Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2008*. Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2, Universitas Jenderal Soedirman
- Kader, Marianus Yofan dan Hardianto, Willy Tri. 2019. *Ombudsman Strategy for Republic Indonesia in East Java Representative Regarding Public Service Supervision*, Malang: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 No. 3, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
- Lestari, Yeni Sri. 2016. *Ombudsman: Suatu Kajian Analisis*. Aceh: Jurnal Public Policy, Vol. 2 No. 2, Universitas Teuku Umar
- Marom, Aufar. 2015. *Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kudus*. Semarang: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol.1 No.1, Universitas Diponegoro
- Muin, Fieman dan Herman. 2018. *Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Pontianak: Tanjungpura Law Journal Vol.2 Issue 2, Universitas Tanjung Pura
- Mustika, Firman. 2018. *Peran Ombudsman dalam Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Baik (Kajian di*

- Provinsi Sulawesi Utara*). Manado: Jurnal Lex Et Societatis Vol.6 No.3, Universitas Sam Ratulangi
- Nuriyanto. 2014. *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State?*. Jawa Timur: Jurnal Konstitusi Vol.11 No.3, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur
- Patulak, Adesya dan Giovanny, Hans. 2020. *Optimalisasi Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Mendukung Sustainable Development Golas Nomor 16 (Target 16:6)*. Makassar: Jurnal Legislatif, Vol. 3 No. 2, Universitas Hasanuddin
- Ristyawati, Aprista. 2020. *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. Semarang: *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 Issue. 2, Universitas Diponegoro
- Sari, Fitri Kartika Sari dan Karay, Agustin C. 2020. *Kewenangan Ombudsman Sebagai Lembaga Independen dalam Pelaksanaan Laporan Masyarakat*, Jambi: Jurnal Hukum STIH YPM, Vol. 2 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPM
- Sitorus, Tri Yanti Nur Irson dan Hariani, Dyah. 2019. *Analisis Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam rangka Penyelesaian Laporan Masyarakat*. Semarang: Jurnal of Public Policy and Management Review, Vol. 8 No. 2, Universitas Diponegoro
- Solechan. 2018. *Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*. *Administrative Law and Governance Journal*. Vol.1 Edisi.2, Universitas Diponegoro
- Suharto, Edi. 2008. *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Bekebutuhan Khusus*. Jakarta: Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (*Service for Customers with Special Needs*) pada Sektor Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Malang: Jurnal Sospol Vo.2 No.1, Universitas Muhammadiyah Malang
- Susanto, Sri Nur Hari. 2015. *Merekonstruksi Sistem Hukum Administrasi Menuju Hukum yang Melayani*. Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid. 44 No.2, Universitas Diponegoro
- Susanto, Sri Nur Hari. 2014. *Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara*

Pasca Amandemen UUD 1945. Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid. 43 No. 2, Universitas Diponegoro

Susilo, Adityo, dkk. 2020. *Corona Virus Disease 2019. Tinjauan Literatur Terkini*. Jakarta: Jurnal Penyakit Dalam Vol.7 No.1, Universitas Indonesia

Sutopo. 2014. *Pentingnya Tata Informasi tentang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat*. Solo: Jurnal of Rural and Development Vol.1 No.1, Universitas Sebelas Maret

Utomo, Anisa Nurchassana, Saputri Denny Perdana dan Melly Nesya Artia. 2015. *Impementasi Peran dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Solo: Jurnal Gema, Vol. 27 No. 50, Universitas Sebelas Maret

Watulingas, Rudy R dan Rondonuwu, Diana E. 2020. *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*. Manado: Jurnal Lex Administratum, Universitas Sam Ratulangi

Yasin, Muhammad Rusan. 2016. *Telaah Tentang Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan*. Palu: Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 11, Universitas Tadulako

Yuliana 2020. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebuah Tinjauan Literatur*. Lampung: Jurnal Wellness and Healthy Magazine Vol. 2 No. 1, Universitas Lampung

Zuliah, Azmiati Zuliah dan Pulungan, Mhd Asri. 2020. *Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia*, Medan: Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Vol. 1 No. 1, Universitas Dharmawangsa

Website

Antisipasi Munculnya Klaster Baru Pemkot Semarang Kembali Terapkan WFH, <https://halosemarang.id/antisipasi-munculnya-klaster-baru-pemkot-semarang-kembali-terapkan-wfh>

Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?. Diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik. Diakses dalam <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>

Ombudsman RI Buka Posko Pengaduan COVID-19. Diakses dalam <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-buka-posko-pengaduan-daring-covid-19>

Menutup Pasar Basah Tradisional di China Bisa Menjadi Kesalahan Fatal, Ini Penjelasan Para Ahli. Diakses dalam <https://almi.or.id/2020/02/12/menutup-pasar-basah-tradisional-di-cina-bisa-menjadi-kesalahan-fatal-ini-penjelasan-ahli/>

Pelayanan Publik Kacau Selama Pandemi Ombudsman Terima 87 Kasus Aduan. Diakses dalam <https://radarsolo.jawapos.com/read/2020/06/13/198911/pelayanan-publik-kacau-selama-pandemi-ombudsman-terima-87-kasus-aduan> diakses

Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan COVID-19 Wabah Nasional. Diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>

Selama Pandemi Covid-19, Ombudsman Terima 1.346 Pengaduan Soal Bansos. Diakses dalam <https://ombudsman.go.id/news/r/selama-pandemi-covid-19-ombudsman-terima-1346-pengaduan-soal-bansos>

WHO statement on cases of COVID-19 surpassing 100 000. Diakses dalam <https://www.who.int/news-room/detail/07-03-2020-who-statement-on-cases-of-covid-19-surpassing-100-000>

LAMPIRAN



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH**

Jl. Siwalan Nomor 5, Wonodri, Kota Semarang, Telp/ Fax: (024) 8442627
website : www.ombudsman.go.id

Semarang, 11 Januari 2021

Nomor : B/ 0008/HM.02.01-14/I/2021
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan dan Penyampaian Data Penelitian

Yth. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
d.a. Jl. Prof. Sudarto S.H., Tembalang
Kota Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor :8155/UN7.5.1.2/DL/2020 tanggal 4 Desember 2020 mengenai Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi dalam rangka penyusunan penulisan hukum (Skripsi) mahasiswa atas nama Devita Ayu Maharani Dengan Judul "Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Tindakan Maladministrasi oleh Penyelenggara Pelayanan Publik di Kota Semarang (Studi terhadap Pengaduan Masyarakat melalui Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah)". Kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu Bulan Maret-November 2020, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah menerima 10 Laporan Masyarakat dengan Instansi Terlapor Pemerintah Kota Semarang, sedangkan untuk periode Maret-November 2019, menerima 20 Laporan Masyarakat dengan Instansi Terlapor Pemerintah Kota Semarang. Adapun rincian Laporan Masyarakat sebagai berikut :

A. LAPORAN TAHUN 2020 (Maret-November)

No	Terlapor	Uraian Peristiwa	Dugaan/Tindakan Maladministrasi	Status Laporan
1.	Walikota Semarang	Keberatan Pelapor atas pencatatan objek tanah yang dikuasai Pelapor ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A oleh Pemerintah Kota Semarang.	Penyimpangan Prosedur	Proses
2.	Kelurahan Kedungpane	Keberatan Pelapor atas pelayanan Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen Kota Semarang.	Tidak diberikan Pelayanan	Proses
3.	Kecamatan Semarang Selatan	Keberatan Pelapor atas belum dibalasnya surat permohonan Audiensi	Penundaan Berlarut	Ditutup

		yang diajukan kepada Camat Semarang Selatan.		
4.	Walikota Semarang	Keberatan Pelapor karena tidak menerima bantuan sosial (BST) padahal termasuk kelompok terdampak covid 19.	Penyimpangan Prosedur	Ditutup
5.	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Pemutusan kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), secara sepihak oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.	Penyimpangan prosedur	Ditutup
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Keberatan atas belum dilaksanakannya rekomendasi segel tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang atas pembangunan rumah di Gang Pinggir Semarang oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.	Penyimpangan Prosedur	Proses
7.	Dinas Perdagangan Kota Semarang	Belum ditanggapinya surat Keberatan atas penyegelan lapak milik Pelapor di Pasar Yaik Baru Kota Semarang yang dikirimkan pada tanggal 26 April 2020, oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang.	Tidak diberikan pelayanan	Ditutup
8.	Walikota Semarang	Keberatan Pelapor terkait pengelolaan lahan di salah satu Kelurahan di Kota Semarang yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Semarang seluas 2.476 m2.	Penyimpangan Prosedur	Ditutup
9.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Keberatan Pelapor atas perhitungan ganti kerugian tanah dan bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.	Penyimpangan Prosedur	Proses

B. LAPORAN TAHUN 2019 (Maret-November)

No	Terlapor	Uraian Peristiwa	Dugaan/Tindakan Maladministrasi	Status Laporan
1.	Sekolah Negeri/Dinas Pendidikan Kota Semarang	Keberatan atas prosedur penetapan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Sekolah Negeri.	Penyimpangan Prosedur	Ditutup

2.	Sekolah Negeri/Dinas Pendidikan Kota Semarang	Adanya permintaan sumbangan uang gedung sebesar Rp 2.500.000,- dan sumbangan sukarela Rp 130.000,- untuk tahun ajaran 2019 di SMAN 12 Semarang, Gunung Pati.	Pungutan	Ditutup
3.	Sekolah Negeri/Dinas Pendidikan Kota Semarang	Keberatan atas penarikan iuran untuk penyediaan Air Minum (AQUA) di SMA 10 Semarang yang tidak sesuai ketentuan dan memberatkan orang tua siswa.	Penyimpangan Prosedur	Ditutup
4.	Walikota Semarang	keberatan atas memorandum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang belum memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia.	Penundaan Berlarut	Proses
5.	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Belum ditindaklanjutnya pengaduan Pelapor tertanggal 31 Januari 2019 oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.	Penundaan Berlarut	Ditutup
6.	Walikota Semarang	Keberatan atas adanya Bangunan tidak berizin di lahan Pemkot Semarang.	Penyimpangan prosedur	Ditutup
7.	Sekolah Negeri/Dinas Pendidikan Kota Semarang	Keberatan Pelapor terkait program studi lingkungan SMP 15 Kota Semarang Tahun 2019/2020 bagi siswa.	Penyimpangan Prosedur	Ditutup
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Keberatan atas proses penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-20052019-0008 tanggal 20 Mei 2019.	Penyimpangan Prosedur	Ditutup
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Keberatan Pelapor atas belum adanya kepastian pengurusan e-KTP dikarenakan ketersediaan blanko.	Penundaan Berlarut	Ditutup
10.	Dinas Pasar dan Perdagangan Kota Semarang	Permohonan registrasi ulang dasaran los buah Yaik Permai yang tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Pasar dan Perdagangan Kota Semarang.	Tidak diberikan pelayanan	Ditutup
11.	Dinas Pendidikan Kota Semarang	Tidak mendapatkan tanggapan atas surat Pelapor yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang tertanggal 15	Tidak diberikan pelayanan	Ditutup

		Agustus 2019 perihal dugaan tindak pidana korupsi		
12.	Kelurahan Tandang	Keberatan Pelapor Terkait Berlarut-Larutnya Permohonan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Yang Dimohonkan Pelapor Kepada Lurah Tandang.	Penundaan Berlarut	Ditutup
13.	Dinas Lingkungan Hidup Semarang	Ketidaksesuaian dalam prosedur pemberhentian Penugasan Pegawai Non PNS di Dinas Lingkungan Hidup Semarang.	Penyimpangan Prosedur	Ditutup
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Keberatan Pelapor dalam proses penerbitan KTP Elektronik karena perubahan data yang belum ada kepastian penyelesaian.	Penundaan Berlarut	Ditutup
15.	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Tidak adanya pemeriksaan, pengawasan, dan pengecekan lapangan oleh Dinas Tata Ruang terhadap kesesuaian IMB pelapor, dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai prosedur sehingga merugikan pelapor saat kondisi bangunan sudah hampir selesai.	Penyimpangan Prosedur	Ditutup
16.	BPKAD Kota Semarang	Keberatan Pelapor terkait belum mendapatkan respon dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Semarang terhadap surat pelapor untuk mengetahui status tanah yang bersangkutan.	Penundaan Berlarut	Ditutup
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Keberatan Pelapor terkait Pembuatan akta kematian yang berkewarganegaraan Jerman oleh Disdukcapil Kota Semarang yang berlarut-larut.	Penundaan Berlarut	Ditutup
18.	Walikota Semarang	Belum mendapatkan respon atas surat pelapor yang ditujukan kepada Walikota Semarang, atas laporan pelapor terkait ketidaksesuaian bangunan di Jl. Imam Bonjol.	Penundaan Berlarut	Ditutup
19.	Kelurahan Kalipancur	Keberatan Pelapor atas belum diberikan oleh Lurah Kalipancur terkait permohonan penerbitan surat penguasaan tanah.	Tidak diberikan pelayanan	Ditutup

20.	Dinas Perhubungan Kota Semarang	Keberatan Pelapor atas dikeluarkannya Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Restaurant Pelangi yang terletak di Jl. Tambora No. 6, Kel. Tegalsari, Kec. Candi, Kota Semarang oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.	Penyimpangan Prosedur	Ditutup
-----	---------------------------------	--	-----------------------	---------

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH
KEPALA,



SITI FARIDA, S.H.,M.H.

Tembusan Yth :

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta

